

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR  
2024**

**PT. BPR ANEKA DANARAYA**



## DAFTAR ISI

	halaman
A. Ringkasan Hasil Penilaian ( <i>Self Assessment</i> ) Atas Penerapan Tata Kelola .....	1
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	6
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	8
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Dan Pemegang Saham Pada Kelompok Usaha BPR .....	10
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR.....	10
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR....	10
3. Kepemilikan Saham Anggota Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR...	10
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain .....	11
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	11
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	11
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR....	11
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	11
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	12
3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR .....	12
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.....	12
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR .....	12
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	12
3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR .....	13
G. Paket/ Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	14
H. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah.....	14
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun.....	15
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	15
K. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	16
L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....	16
M. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	18
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Lain.....	18

---

## A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jl. Siliwangi SH 4 No. 9 Pertokoan Pamulang Permai, Pamulang, Tangerang Selatan
Nomor Telepon	021-7490522, 7408093
Penjelasan Umum	<p>Direksi dan Dewan Komisaris BPR berkomitmen dalam melaksanakan tata kelola yang baik untuk menghindari benturan kepentingan, eningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam berkerja. Komitmen ini mencakup melengkapi struktur organisasi, pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas, pelatihan dan pengembangan SDM serta pengawasan dan evaluasi yang efektif.</p> <p>Penerapan Tata Kelola pada BPR dilandaskan pada prinsip dasar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan (<i>transparency</i>). Pengambilan keputusan rapat seperti kebijakan dan keputusan strategis oleh Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</li> <li>2. Akuntabilitas (<i>accountability</i>). Setiap pengurus dan karyawan bank memiliki jobdesk atau deskripsi pekerjaan yang spesifik dan jelas. Jobdesk ini membantu mereka memahami tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan.</li> <li>3. Tanggung jawab (<i>responsibility</i>). Setiap pengurus dan karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan regulasi yang berlaku.</li> <li>4. Independensi (<i>independency</i>). BPR melakukan aktivitasnya dengan independensi dan transparansi, tanpa adanya intervensi dari pihak lain.</li> <li>5. Kewajaran (<i>fairness</i>). BPR memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua nasabah, tanpa diskriminasi untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjaga reputasi yang baik. Perlakuan yang adil dan setara juga merupakan bagian dari prinsip kepatuhan dan etika dalam industri perbankan.</li> </ol> <p>Dengan tata kelola yang baik, BPR dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko penyimpangan. Komitmen ini juga membantu meningkatkan kepercayaan nasabah dan stakeholders.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola adalah 3 (Cukup Baik).
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR. Secara umum pelaksanaan prinsip – prinsip Tata Kelola BPR Aneka Danaraya sudah mulai

diterapkan tetapi masih belum optimal. Terdapat faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola, sebagai berikut :

1. Struktur

- a) BPR sudah mempunyai anggota Direksi 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
- b) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dan akan mengevaluasi apabila terdapat perubahan peraturan dan/ atau yang dapat mempengaruhi usaha BPR.

2. Proses

- a) Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu untuk mendukung visi dan misi BPR.
- b) Direksi mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan prinsip kehati-hatian.

3. Hasil

- a) Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b) Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Terdapat faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola, sebagai berikut :

1. Struktur

BPR memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dan pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, namun belum secara berkala mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.

2. Proses

	<p>a) BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b) Direksi belum secara optimal dalam melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik.</p> <p>c) Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>d) Belum semua unit - unit kerja ikut dalam sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen risiko, untuk mendukung kegiatan usaha, visi, misi dan mencegah kerugian BPR yang mengakibatkan kurangnya kesadaran risiko (<i>risk awarness</i>) pada proses kerja masing - masing unit (terutama bagian kredit).</p> <p>3. Hasil</p> <p>BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta akan selalu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.</p> <p>Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Berdasarkan kesimpulan di atas, BPR telah melakukan penerapan Tata Kelola secara umum Cukup Baik, masih terdapat kekurangan, adapun belum terpenuhinya aspek - aspek dan struktur maupun infrastruktur akan dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.</p>
--	--

**B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : -
	Nama : Saniatma Adinoto
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Menjalankan kewajiban – kewajiban lainnya sesuai dengan Tata Tertib kerja Direksi serta ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang – undangan. b. Melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola ( <i>Good Corporate Governance</i> ) dalam kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi. c. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan BPR. d. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. e. Menyiapkan rencana pengembangan BPR, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR, termasuk rencana lainnya yang

	<p>berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BPR dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.</p> <p>f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan perundangan, AD, dan keputusan RUPS.</p> <p>i. Menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>j. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain penyampaian informasi kepada seluruh karyawan dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip – prinsip manajemen risiko, termasuk mengembangkan budaya sadar risiko (<i>risk awareness</i>) serta pentingnya pengendalian intern yang efektif.</p> <p>k. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.</p> <p>l. Menyediakan data/informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data/informasi sesuai ketentuan</p> <p>m. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi (skala dan komponen remunerasi, serta mekanismenya) bagi PE dan pegawai, melakukan evaluasi secara berkala kebijakan tersebut.</p> <p>n. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fungsi audit intern;</li> <li>2) Fungsi manajemen risiko; dan</li> <li>3) Fungsi kepatuhan.</li> </ol> <p>o. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.</p> <p>p. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan APU PPT.</p> <p>q. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan</p>
--	---

	Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
2.	NIK : -
	Nama : Albertus Susilo
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip kehati – hatian. b. Melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola ( <i>Good Corporate Governance</i> ) dalam kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi. c. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan BPR. d. Berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan perundangan, AD, dan keputusan RUPS. e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. f. Menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada PS melalui RUPS. h. Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja. i. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko. j. Bertanggung jawab atas perkreditan di BPR. k. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai. l. Menyediakan data/informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data/informasi sesuai ketentuan. m. Membantu Direktur Utama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR. n. Membantu Direktur Utama menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi (skala dan komponen remunerasi, serta mekanismenya) bagi PE dan pegawai, melakukan evaluasi secara berkala kebijakan tersebut. o. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional

	p. Menjalankan kewajiban – kewajiban lainnya sesuai dengan Tata Tertib kerja Direksi serta ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang – undangan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemberian kredit dengan tetap menjalankan prinsip kehati – hatian.</li> <li>2. Pemberian kredit fokus kepada karyawan grup untuk meminimalisir risiko.</li> <li>3. Penagihan pinjaman Macet untuk menekan NPL.</li> <li>4. Penerapan APU PPT.</li> </ol>	

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>NIK : -</p> <p>Nama : Wanlianto</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi berdasarkan prinsip kehati-hatian.</p> <p>d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p> <p>e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Mengarahkan/memantau/mengevaluasi tata kelola/ MR/ kepatuhan dan system pengendalian internal BPR.</p> <p>g. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p>

	<p>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>i. Mengusulkan penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.</p> <p>j. Memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan BPR, melalaikan kewajiban dan/ atau melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p> <p>k. Melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>
2.	<p>NIK : -</p> <p>Nama : Goei Elvian Kertojoyo</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi berdasarkan prinsip kehati-hatian.</p> <p>f. Mengarahkan/memantau/mengevaluasi tata kelola/ MR/ kepatuhan dan system pengendalian internal BPR.</p> <p>g. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p>h. Membantu Komisaris Utama dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR.</p> <p>i. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p>

	<p>1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</p> <p>2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <p>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;</p> <p>k. Melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selalu mematuhi hukum, undang-undang, dan peraturan yang berlaku.</li> <li>Menjalankan tatakelola dengan sebaik-baiknya, serta melakukan efisiensi.</li> <li>Memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan.</li> </ol>

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR Aneka Danaraya memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), sehingga belum wajib membentuk Komite, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4.	Komite Manajemen Risiko

	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	-	Saniatma Adinoto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Albertus Susilo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	-	Wanlianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Goei Elvian Kertojoyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	-	PT. Mitra Duta Mas	BPR Aneka Danaraya	48 %	48 %
2.	-	PT. Reratonaindah Perdana	BPR Aneka Danaraya	32 %	32 %
3.	-	PT. Perkom Indah Murni	BPR Aneka Danaraya	20 %	20 %

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	-	Saniatma Adinoto	-	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Albertus Susilo	-	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	-	Wanlianto	-	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Goei Elvian Kertojoyo	-	Tidak ada	Tidak ada

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Saniatma Adinoto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Albertus Susilo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Wanlianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Goei Elvian Kertojoyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	PT. Mitra Duta Mas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	PT. Reratonaindah Perdana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	-	PT. Perkom Indah Murni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Saniatma Adinoto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Albertus Susilo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Wanlianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Goei Elvian Kertojoyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	PT. Mitra Duta Mas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	PT. Reratonaindah Perdana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	-	PT. Perkom Indah Murni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	299.520.000	0	0
2.	Tunjangan	2	108.000.000	0	0
3.	Tantiem	0	0	2	45.000.000
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunersi lainnya	0	0	0	0
	<b>Total Remunerasi</b>		<b>407.520.000</b>		<b>45.000.000</b>
	<b>Jenis Fasilitas Lain</b>				
1.	Perumahan	0	0	0	0
2.	Transportasi	0	0	0	0
3.	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4.	Fasilitas Lainnya	0	0	0	0
	<b>Total Fasilitas Lainnya</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>407.520.000</b>		<b>45.000.000</b>

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.51
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0.00

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.31

#### I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	8 April 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan ekspansi kredit dengan tetap berpegang prinsip kehati – hatian.</li> <li>b. Pemberian kredit dengan menitikberatkan kepada karyawan grup, untuk menekan risiko kredit tidak lancar.</li> <li>c. Efisiensi kebutuhan dana.</li> <li>d. Menekan jumlah NPL, dengan salah satu cara lelang jaminan.</li> </ul>
2.	8 Juli 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ekpansi kredit perlu ditingkatkan dengan tetap menjaga kualitas kredit yang diberikan. Pemberian pinjaman dengan jaminan perlu diperhatikan nilai dan jumlah pinjaman yang akan diberikan.</li> <li>b. Pemberian pinjaman di fokuskan kepada karyawan grup, karena pemberian pada pinjaman umum memiliki kecenderungan NPL tinggi.</li> <li>c. BPR memiliki akses untuk memotong gaji karyawan grup atas pinjaman yang diberikan, sebagai salah satu mitigasi risiko untuk kelancaran pembayaran angsuran.</li> <li>d. Menekan NPL dengan cara lelang dan pemberian pinjaman kepada karyawan grup.</li> <li>e. Penerapan APU PPT.</li> </ul>
3.	13 September 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan laba dengan cara meningkatkan pemberian kredit.</li> <li>b. Pemberian kredit difokuskan kepada grup usaha dan tetap berpegang prinsip kehati – hatian.</li> <li>c. Pinjaman kepada nasabah umum tetap diberikan dengan agunan yang memadai dan sesuai prosedur.</li> <li>d. Penerapan APU PPT.</li> </ul>
4.	20 Desember 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian kredit terus ditingkatkan.</li> <li>b. Edukasi kepada calon nasabah dan nasabah tentang pinjaman online. Peningkatan kewaspadaan dan kehati – hatian terhadap pemberian pinjaman untuk yang mempunyai pinjaman online, karena akan berpengaruh terhadap risiko kredit.</li> <li>c. Pemberian kredit untuk usaha yang bernilai baik terhadap lingkungan hidup.</li> </ul>

			d. Penerapan APU PPT .
--	--	--	------------------------

**J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	-	Wanlianto	-	4	100%
2.	-	Goei Elvian Kertojoyo	-	4	100%

**K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Selama Tahun 2024, PT. BPR Aneka Danaraya tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh para pengurus, pegawai tetap dan pegawai kontrak BPR, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit.

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Peyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Tidak terdapat permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Aneka Danaraya selama tahun 2024, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Aneka Danaraya selama tahun 2024.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

Selama tahun 2024, PT. BPR Aneka Danaraya tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-	-	-

Pamulang, 24 April 2025  
PT. BPR Aneka Danaraya

  **PT. BPR ANEKA DANARAYA**   
Saniatma Adinoto Wanlianto  
Direktur Utama Komisariss Utama